



TAJUK

Masa Depan Anak Dipertaruhkan, Pengawasan Daycare Jadi Catatan

Penetapan 13 tersangka oleh Polresta Jogja dalam kasus dugaan kekerasan di sebuah daycare menjadi alarm keras bagi kita semua. Lebih dari sekadar perkara hukum, fakta bahwa sedikitnya 53 dari 103 anak yang pernah dititipkan terindikasi mengalami kekerasan menghadirkan kenyataan pahit. Ruang yang seharusnya aman justru berubah menjadi tempat yang menyisakan trauma. Korban yang didominasi bayi dan anak balita—kelompok paling rentan—menjadikan kasus ini bukan hanya memprihatinkan, tetapi juga mendesak untuk ditangani secara menyeluruh.

Kasus ini jelas tidak bisa berhenti pada penindakan. Proses hukum memang penting sebagai bentuk keadilan bagi korban, tetapi persoalan yang lebih besar adalah bagaimana sistem pengawasan dan standar pengasuhan bisa begitu langgar hingga praktik kekerasan luput dari deteksi. Penitipan anak atau daycare, yang kian menjadi kebutuhan masyarakat urban, seharusnya memiliki mekanisme kontrol yang ketat, mulai dari rekrutmen pengasuh, pelatihan, hingga evaluasi berkala. Tanpa itu, kepercayaan publik akan terus tergerus. Kasus ini juga membuka pertanyaan tentang peran pemerintah daerah. Apakah pendataan dan perizinan daycare telah berjalan optimal? Apakah ada inspeksi rutin yang benar-benar memastikan keamanan anak? Jika pengawasan hanya bersifat administratif tanpa verifikasi lapangan yang serius, maka celah penyimpangan akan selalu ada. Di titik ini, pemerintah tidak cukup hanya hadir setelah kejadian, tetapi harus menjadi garda depan dalam pencegahan. Di sisi lain, orang tua pun dihadapkan pada dilema. Tuntutan ekonomi membuat banyak keluarga tidak memiliki pilihan selain menitipkan anak. Namun, keterbatasan waktu dan akses informasi sering kali membuat proses memilih daycare tidak dilakukan secara mendalam. Ke depan, literasi orang tua tentang standar pengasuhan yang aman perlu diperkuat, termasuk keberanian untuk menuntut transparansi dari pengelola daycare. Lebih jauh, kasus ini juga mencerminkan persoalan budaya dalam pengasuhan. Kekerasan kerap masih dianggap sebagai bagian dari "pendisiplinan", sebuah pandangan yang jelas keliru. Anak, terlebih bayi dan balita, membutuhkan perlindungan penuh, bukan tekanan fisik maupun psikologis. Mengubah cara pandang ini memerlukan upaya kolektif, mulai dari edukasi hingga penegakan hukum yang tegas. Peristiwa ini harus menjadi momentum pembenahan. Tidak boleh ada lagi ruang pengasuhan yang beroperasi tanpa standar yang jelas dan pengawasan ketat. Anak-anak adalah masa depan, dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Jika kita abai, maka luka yang hari ini tersembunyi di balik pintu daycare bisa menjadi beban panjang bagi generasi mendatang.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005